

DAFTAR BACAAN

- Asshiddiq, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *perkembangan & konsidasi lembaga Negara pasca reformasi*, sinar grafika, Jakarta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Harahap, M. yahya, *hukum perseroan terbatas*, cet-6, sinar grafika, Jakarta, 2016.
- Hadjon, Philipus M, *pengantar hukum administrasi Indonesia*, gadjah mada university press, Yogyakarta, 2015.
- Hadjon, Philipus M, *pengantar hukum administrasi Indonesia*, gadjah mada university press, Yogyakarta, 2015.
- H.R, Ridwan, *hukum administrasi Negara*, Cet-8, PT. Raja grafindo, Jakarta, 2013.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Manan, Bagir, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995, h. 8.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet -2, FH Ull Press, Yogyakarta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *pengantar ilmu hukum*, preadamedia group, Jakarta, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *penemuan hukum (sebuah pengantar)*, liberty, yogyakarta, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Rifai, Amzulian, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010.
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang – undangan*, Cet-1, sinar grafika, Jakarta, 2018.

- Soeprijanto, Totok, *Sepintas Kajian Tata Urutan Perundang-Undangan Dan Pendelegasian Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2014.
- S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan)*, Kanisius, Jakarta, 2007.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesi*, Cet-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- untung, Hendrik budi, *corporate social responsibility*, sinar grafika, Jakarta, 2008.
- Visser, Ph. dan t Hoft, *Penemuan Hukum/Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, Bandung, 2001.
- wibisono, Yusuf, *membedah konsep dan aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, fascho publishing, gresik, 2007.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Sukardi, *Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2009.
- Danmadiyah, Shevierra , *Kewenangan Kementrian Hukum dan HAM dalam Penyelesaian Sengketa perundang – undangan Melalui Jalur Non Litigasi*, Skripsi, Universitas Airlangga, 2019.

PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR

- Hadjon, Philipus M, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

JURNAL

- Hadjon, Philipus M, *Tentang Wewenang*, journal Yuridika, universitas airlangga.
- Priono, Agus, Widodo T. Novianto , I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2017*
- Suriadinata, Vincent, *Asas Presumptio Iustae Causa dalam KTUN: Penundaan Pelaksanaan KTUN oleh Hakim Peradilan Umum*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 2 Nomor 2, April 2018, Halaman 139 – 152

Pattinasarany, Yohanes, Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2011

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 Tahun 2008

MAKALAH

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Masalah-masalah yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia setelah Amandemen UUD*, (Makalah) FH UII, Yogyakarta, 2003.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5235)

- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722)
- Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor. 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4)
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2015 Seri E; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 42)
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No.7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 5 Tahun 2012; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4)
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.6 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan (Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 362-6/2015; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 6)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2)
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87)

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 2 Seri E; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 34)
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 13)
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 6 Seri E; Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat : 112 / 2015)
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Seri E Nomor 4; Noreg Peraturan Daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat : 6/228/2016)
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100)
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 3013 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58)
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4)